



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BAPPEDA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2018



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018.

Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan kinerja ini bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pidie Jaya selama tahun 2018. Dengan adanya laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Pidie Jaya selama tahun 2018. Laporan ini diharapkan juga dapat menjadi bahan evaluasi dalam rangka peningkatan capaian kinerja dan dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Pidie Jaya.

Kami menyadari laporan ini tidak luput dari banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan di tahun yang akan datang.

Meureudu, 18 Januari 2019

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN PIDIE JAYA**

Munawar Ibrahim, S.Kp.,MPH
Pembina Utama Muda
NIP. 1967050901998021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas dan Fungsi Bappeda	1
1.3 Struktur Organisasi	3
1.4 Isu Strategis	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
2.1 Capain Kinerja Organisasi	5
2.1.1 Visi dan Misi	5
2.1.2 Tujuan dan Sasaran.....	6
2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan.....	8
2.2 Perjanjian Kinerja	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	12
3.2 Realisasi Anggaran	21
BAB IV PENUTUP	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan pada setiap instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Tujuan penyusunan pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan acuan dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Pidie Jaya Tahun 2014 – 2019, penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya didasarkan pada indikator kinerja yang ada yang ditetapkan lewat tujuan dan sasaran yang direncanakan. Realisasi dan dilaporkan dalam Laporan kinerja ini adalah realisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disusun pada Tahun 2018.

1.2 Tugas dan Fungsi Bappeda

Berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie

Jaya, Bappeda Kabupaten Pidie Jaya memiliki tugas yaitu melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Bappeda menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan badan;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan, perencanaan dan pembangunan keistimewaan dan SDM, perencanaan sarana dan prasarana, penelitian, pengendalian dan evaluasi pembangunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan dibidang ekonomi dan ketenagakerjaan, sarana dan prasarana, dan sosial budaya;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di daerah yang bersumber dari APBK dan APBN;
- f. Penyiapan bahan rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di daerah;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugas.

Dalam penyelenggaraan fungsinya Bappeda memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten (RPJPK);
- b. Melakukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK);
- c. Melakukan koordinasi penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja SKPK);
- d. Melakukan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang);
- e. Melakukan koordinasi penyusunan program dan kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Kabupaten (RKPK), berdasarkan rumusan hasil Musrenbang kabupaten;

- f. Mengkoordinasikan perencanaan program/kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPK melalui tim anggaran;
- g. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) melalui tim anggaran;
- h. Meneliti dan mengevaluasi RKA-SKPK untuk bahan penyusunan RAPBK melalui tim anggaran;
- i. Menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPK.

1.3 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bappeda dibantu oleh aparatur yang terdapat di dalam struktur organisasi Bappeda. Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Bappeda
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Penyusunan Program
 - 3) Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan ketenagakerjaan, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Ketahanan Pangan
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Usaha dan Investasi
- d. Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Perumahan
 - 2) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - 3) Sub Bidang Pengembangan Wilayah
- e. Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan dan Sumber Daya Manusia, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pengembangan SDM dan dan Keistimewaan
 - 2) Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial
 - 3) Sub Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan

- f. Bidang Penelitian, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan, terdiri dari:
- 1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - 2) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
 - 3) Sub Bidang Data dan Publikasi

1.4 Isu Strategis

Permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi Bappeda Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya Jumlah aparatur bidang perencanaan yang berkualitas sesuai dengan latar belakang ilmu yang dibutuhkan, sementara tugas pokok perencanaan daerah sangat banyak;
- 2) Belum terciptanya sistem perencanaan daerah yang terpadu sesuai dengan SOP yang ditetapkan;
- 3) Koordinasi dengan SKPK /SKPA belum efektif sehingga perlu peningkatan koordinasi dan komunikasi;
- 4) Hasil monitoring dan evaluasi setiap kegiatan belum diterapkan sebagai pembelajaran untuk perencanaan tahun berikutnya;
- 5) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan informasi, penelitian dan pengembangan serta pengendalian perencanaan pembangunan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Capaian Kinerja Organisasi

Rencana Strategis Kabupaten Pidie Jaya merupakan dokumen perencanaan Bappeda untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Pidie Jaya.

Sebagai faktor pendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Pidie Jaya Tahun 2014-2019, maka Perubahan Renstra Bappeda disusun dengan berpedoman pada RPJMK tersebut.

2.1.1 Visi dan Misi

Dalam RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014 s.d 2019 telah menyebutkan Visi dan Misi serta Program Pembangunan Bupati terpilih selama 5 (lima) tahun yaitu *“Terwujudnya Masyarakat Pidie Jaya yang Aman, Sejahtera, dan Mandiri dengan Berlandaskan UUPA”* dengan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur melalui reformasi birokrasi yang efisien, bersih, tertata, dan berwibawa;
2. Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan dengan memaksimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya daerah dan perluasan lapangan usaha;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
4. Meningkatkan pemerataan infrastruktur pendukung layanan dasar dan perekonomian secara terintegrasi dan terpadu;
5. Mewujudkan kehidupan berbasis pemberdayaan dan perlindungan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Syariat Islam.

Untuk mewujudkan visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2019, ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

- Misi 1 : Menyusun dokumen perencanaan yang berkualitas.
- Misi 2 : Melaksanakan penatausahaan Bappeda Kabupaten Pidie Jaya yang akuntabel.
- Misi 3 : Menyediakan data dan informasi perencanaan pembangunan yang akurat.
- Misi 4 : Melaksanakan kajian/studi pembangunan secara analitis dan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) sesuai kebutuhan.
- Misi 5 : Melakukan koordinasi dan sosialisasi perencanaan pembangunan secara terpadu.
- Misi 6 : Melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel.

Untuk menjawab visi dan misi tersebut maka Bupati Pidie Jaya menetapkan 9 (sembilan) prioritas pembangunan dalam RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014 s.d 2019 diantaranya adalah:

1. Penataan Birokrasi Pemerintahan;
2. Pelaksanaan Syariat Islam;
3. Pendidikan;
4. Kesehatan;
5. Penanggulangan Kemiskinan;
6. Ketahanan Pangan dan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Daerah/Alam;
7. Infrastruktur Pendukung yang Terintegrasi;
8. Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial; dan
9. Lingkungan Hidup dan Kebencanaan.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Pidie Jaya mengacu pada Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019 yaitu Mewujudkan kualitas pelayanan aparatur melalui reformasi birokrasi yang efisien, bersih, tertata, dan

berwibawa. Sedangkan sasarannya adalah Terwujudnya birokrasi yang kuat melalui mengoptimalkan pelayanan publik yang akuntabel dan bebas dari korupsi.

Indikator tujuan yang digunakan yaitu Prosentase Kualitas kinerja Aparatur yang memiliki kompetensi dengan target awal hanya 55 % dengan harapan di tahun akhir renstra (2019) menjadi 70%. Sedangkan indikator tujuan yaitu Terwujudnya birokrasi yang kuat melalui mengoptimalkan pelayanan publik yang akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan target awal hanya 90 % dengan harapan di tahun akhir renstra menjadi 100%. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015 s.d 2019

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN (TAHUN)				
			2015	2016	2017	2018	2019
Mewujudkan kualitas pelayanan aparatur melalui reformasi birokrasi yang efisien, bersih, tertata, dan berwibawa.		Prosentase Kualitas kinerja Aparatur yang memiliki kompetensi	55%	57%	60%	65%	70%
	Terwujudnya birokrasi yang kuat melalui mengoptimalkan pelayanan publik yang akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan dan e-planning	90%	90%	100 %	100 %	100 %

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan cara atau langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan organisasi. Perumusan strategi lebih bersifat makro. Strategi pada dasarnya dapat dijabarkan dalam bentuk kebijakan dan program yang hendak dilaksanakan oleh masing-masing organisasi.

Arah Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan visi, misi serta tujuan dan sasaran SKPK.

Adapun strategi dan kebijakan yang ditempuh Bappeda Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut:

Strategi : meningkatkan peran dan fungsi Bappeda sebagai lembaga pelaksana kebijakan daerah dibidang perencanaan.

Kebijakan : melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

Konsistensi antar pernyataan Visi dan Misi RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019 dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Pidie Jaya yang Aman, Sejahtera, dan Mandiri dengan Berlandaskan UUPA.			
MISI I : Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur melalui reformasi birokrasi yang efisien, bersih, tertata, dan berwibawa.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan kualitas pelayanan aparatur melalui reformasi birokrasi yang efisien, bersih, tertata, dan berwibawa.	Terwujudnya birokrasi yang kuat melalui mengoptimalkan pelayanan publik yang akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.	Peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kinerja dan teknologi;	Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan secara transparan, akuntabel, tertata baik serta mengacu kepada upaya reformasi birokrasi yang telah ditetapkan.

2.2. Perjanjian Kinerja

Pengukuran kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 mengacu pada indikator kinerja sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014-2019 sebagaimana tertuang pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Tahun 2018

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	Terwujudnya birokrasi yang kuat melalui mengoptimalkan pelayanan publik yang akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan
		Proses perencanaan pembangunan menggunakan aplikasi E-Planning
		Jumlah Dokumen data dan informasi Pembangunan daerah yang tersedia

Dalam usaha untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, Bappeda Kabupaten Pidie Jaya menetapkan indikator sasaran serta target capaian indikator sasaran yang ingin dicapai tiap tahun. Target kinerja tahun 2018 direncanakan menyesuaikan dengan Perubahan Renstra Bappeda tahun 2014-2019 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2018. Adapun Perjanjian Kinerja tahun 2018 seperti dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Bappeda Kabupaten Pidie Jaya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya birokrasi yang kuat melalui mengoptimalkan pelayanan publik yang akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan	100 %
		Proses perencanaan pembangunan menggunakan aplikasi E-Planning	50 %
		Jumlah Dokumen data dan informasi Pembangunan daerah yang tersedia	10 dok

Untuk mencapai target sasaran tersebut dilakukan melalui program dan kegiatan tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan tahun 2018

No	Program	Kegiatan
1	Program Perencanaan Tata Ruang	Pengendalian Tata Ruang
2	Program Pengembangan Data/Informasi	Geografis Informasi Sistem (GIS)
		Pusat Data/Informasi (Pusdatin) Bappeda Kabupaten Kidie Jaya
		Pengembangan Database Pembangunan Daerah
		Publikasi Data/Informasi Pembangunan Daerah Melalui Teknologi Informasi
		Publikasi Data Statistik Daerah

No	Program	Kegiatan
3	Program kerjasama pembangunan	Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Khusus
		Percepatan Pembangunan Daerah
		Penyusunan perkembangan pembangunan Daerah
4	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air
		Pelaksanaan Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) dan Air Minum Dan AMPL
		Peningkatan Kemampuan Teknis Penguasaan Teknologi Dan Informasi Aparat Perencana
5	Program perencanaan pembangunan daerah	Penyusunan Rancangan RKPD
		Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
		Monitoring; Evaluasi; Pengendalian; Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
		Penyusunan RKT
		Penyusunan KU-APBK
		Penyusunan PPAS
		Penyusunan PPAS Perubahan
		Penyusunan KU-APBK Perubahan
		Penyusunan Dokumen Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM)
		Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu Jangka Menengah
		Transparansi dan Realisasi Anggaran
		Penyusunan Perubahan RKPD
		Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Elektronik
Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD		
Penetapan perubahan RPJMD		
6	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
		Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
		Promosi Potensi Pembangunan Ekonomi Daerah
7	Program perencanaan sosial dan budaya	Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
		Penanggulangan Kemiskinan Daerah
		Fasilitasi Percepatan pembangunan Gampong
		Pelaksanaan Program SGDs
8	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya
		Pelaksanaan Kegiatan Program Penanganan Lahan Kritis Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)
		Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara berkala.

Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dimaksudkan sebagai manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 digunakan untuk mengetahui keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2019.

3.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin menurun.

Pengukuran kinerja Bappeda Kabupaten Pidie Jaya dilakukan dengan mengelompokkan peringkat capaian kinerja sesuai dengan kategori kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1
Peringkat Capaian Kinerja

No	Interval	Kategori kinerja
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	55% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Rincian tingkat capaian indikator kinerja Bappeda Kabupaten Pidie Jaya dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Sasaran Strategis:

“Terwujudnya birokrasi yang kuat melalui mengoptimalkan pelayanan publik yang akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme”.

Adapun pencapaian target kinerja terhadap sasaran tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Sasaran Strategis

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan	100 %	100 %	100 %
2.	Proses perencanaan pembangunan menggunakan aplikasi e-Planning	50 %	50 %	100 %
3.	Jumlah Dokumen data dan informasi Pembangunan daerah yang tersedia	10 dok	10 dok	100 %

a. Indikator Kinerja “Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan”

Hasil dari ketercapaian sasaran ditunjukkan dengan telah dilaksanakannya program yang mendukung tercapainya indikator kinerja tersebut yaitu Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Persentase Dokumen perencanaan yang disusun}}{\text{Persentase dokumen yang direncanakan}} \times 100\%$$

b. Indikator Kinerja “Proses perencanaan pembangunan menggunakan aplikasi E-Planning”

Hasil dari ketercapaian sasaran ditunjukkan dengan telah dilaksanakannya program yang mendukung tercapainya indikator tersebut yaitu Program Perencanaan Pembangunan Daerah khususnya untuk kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD, Penyusunan Perubahan RKPD, Penyusunan KU-APBK, Penyusunan PPAS, Penyusunan PPAS Perubahan, Penyusunan KU-APBK Perubahan dan Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Elektronik.

Untuk menghitung capaian yang diperoleh digunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Dokumen perencanaan yang disusun menggunakan e-planning}}{\text{Dokumen yang direncanakan menggunakan e-planning}} \times 100\%$$

c. Indikator Kinerja “Jumlah Dokumen data dan informasi Pembangunan daerah yang tersedia”

Hasil dari ketercapaian sasaran ditunjukkan dengan telah dilaksanakannya program yang mendukung tercapainya indikator kinerja tersebut yaitu Program Pengembangan Data/ Informasi dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah dokumen data dan informasi yang direncanakan}}{\text{Jumlah dokumen data dan informasi yang tersedia}} \times 100\%$$

Berdasarkan tabel 3.2 di atas terdapat satu sasaran strategis yang terbagi ke dalam 3 (tiga) indikator kinerja. Sebagai catatan, indikator kinerja sasaran strategis merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kabupaten Pidie Jaya dan indikator kinerja lainnya yang relevan. Pencapaian indikator kinerja pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- Rata-rata capaian indikator kinerja “Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan” sebesar 100 %.

- Rata-rata capaian indikator kinerja “Proses perencanaan pembangunan menggunakan aplikasi e-Planning” sebesar 100 %.
- Rata-rata capaian indikator kinerja pada sasaran strategis “Jumlah Dokumen data dan informasi Pembangunan daerah yang tersedia” sebesar 100 %.

Semua indikator kinerja sasaran tersebut di atas berada dalam klasifikasi sangat tinggi. Capaian tersebut diperoleh dengan efisiensi penggunaan sumber daya aparatur dan kerjasama yang baik antara Bappeda, Pemerintah Kabupaten dan SKPK terkait.

3.1.2 Perbandingan antara Realisasi serta Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan tahun 2017 dan tahun 2015-2016

Berdasarkan Perubahan Renstra Bappeda 2014-2019, target kinerja masing-masing sasaran dan indikator kinerja Bappeda Kabupaten Pidie Jaya dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.3
Target Kinerja Sasaran Tahun 2014-2019

NO	Indikator Kinerja	Target					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan	90 %	90 %	90 %	100 %	100 %	100 %
2	Proses perencanaan pembangunan menggunakan aplikasi e-Planning	0 %	0 %	0 %	0 %	50 %	100 %
3	Jumlah Dokumen data dan informasi Pembangunan daerah yang tersedia	10 dok	10 dok	10 dok	10 dok	10 dok	10 dok

Besarnya target realisasi dari masing-masing indikator kinerja utama ditetapkan berdasarkan persentase target dan realisasi per kegiatan. Selanjutnya nilai capaian dari indikator kinerja utama dihitung berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi atau berdasarkan nilai rata-rata indikator kinerja (tabel 3.4 dan tabel 3.5).

Penentuannya didasarkan pada hasil (output) dan keluaran (output) dari kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya misi, sasaran dan tujuan dari masing-masing indikator kinerja. Besarnya realisasi dan capaian kinerja tahun 2018 digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Berdasarka IKU

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Capaian			
		2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
1	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan	80%	90%	95%	100%	89%	100%	95%	100%
2	Proses perencanaan pembangunan menggunakan aplikasi e-Planning	0%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	100%
3	Jumlah Dokumen data dan informasi Pembangunan daerah yang tersedia	10 dok	10 dok	10 dok	10 dok	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel 3.3 dan tabel 3.4 di atas, dapat dilakukan analisis capaian indikator kinerja yaitu sebagai berikut:

Perbandingan antara target dan realisasi antara tahun berjalan (tahun 2018) dengan beberapa tahun terakhir (tahun 2015-2017), secara umum mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah (Target yang Ditetapkan dalam Renstra)

Besarnya perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis Bappeda Kabupaten Pidie Jaya dapat digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 3.5**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target Renstra tahun 2018**

NO	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Target Renstra
1	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan	100%	100 %
2	Proses perencanaan pembangunan menggunakan aplikasi e-Planning	50%	50 %
3	Jumlah Dokumen data dan informasi Pembangunan daerah yang tersedia	10 dok	10 dok

Berdasarkan gambaran pada tabel 3.5 jelas terlihat bahwa perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2018 dengan target yang tercantum dalam dokumen Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2014-2019 tidak terdapat perbedaan. Hal ini menunjukkan kinerja kelembagaan Bappeda secara kualitatif sudah sesuai dengan yang diharapkan.

3.1.4 Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Pengukuran Capaian Kinerja Bappeda Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 dapat disampaikan analisis keberhasilan atau peningkatan kinerja dan alternatif solusi pencapaian indikator-indikator kinerja sebagai berikut:

A. Indikator kinerja “Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan” dengan capaian 100%.

Tercapainya target secara maksimal ini karena penyusunan dokumen perencanaan daerah merupakan tugas pokok dan fungsi Bappeda sehingga program dan kegiatan penyusunan dokumen tersebut menjadi prioritas Bappeda. Dukungan dana, data dan dokumen yang tersedia, sumber daya penyusun yang kapabel dan komunikatif, koordinasi dan kerjasama yang baik antara aparatur pemerintah, aparatur Bappeda dan instansi terkait juga turut berperan dalam pencapaian sasaran.

Dalam rangka mendukung kelancaran proses perencanaan pembangunan daerah, tahun 2018 Bappeda Kabupaten Pidie Jaya telah menyusun dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2019. Dokumen ini sangat penting untuk mengakomodir program-program yang telah dilaksanakan oleh SKPK yang tidak terdapat dalam dokumen RPJM sebelumnya.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun pada tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

- Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Pidie Jaya Tahun 2019;
- Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019;
- KU-APBK Pidie Jaya Tahun 2019;
- PPAS Pidie Jaya Tahun 2019;
- KU-APBK Pidie Jaya Perubahan Tahun 2018;
- PPAS Pidie Jaya Perubahan Tahun 2018;
- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2019;
- Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Perubahan Tahun 2018;
- Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RP2IJM);
- Rancangan Teknokratik RPJM .

Program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja dari sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan :

- a. Penyusunan rancangan RKPD
- b. Penyelenggaraan musrenbang RKPD
- c. Penyusunan RKT
- d. Penyusunan KU-APBK
- e. Penyusunan PPAS

- f. Penyusunan PPAS Perubahan
- g. Penyusunan KU-APBK Perubahan
- h. Penyusunan Dokumen Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM)
- i. Penyusunan Perubahan RKPD
- j. Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD
- k. Penetapan Perubahan RPJMD.

B. Indikator kinerja “Proses perencanaan pembangunan menggunakan aplikasi e-Planning” **dengan capaian 100%.**

Tercapainya target sesuai dengan yang ditetapkan tidak terlepas dari kerjasama antara SKPK terkait dengan Bappeda dalam menerapkan penggunaan aplikasi perencanaan secara elektronik (*e-planning*) untuk penyusunan rencana program, kegiatan dan pendanaan.

Aplikasi ini merupakan sebuah perangkat lunak yang berfungsi untuk menjaga konsistensi antara pelaksanaan pembangunan dengan dokumen perencanaan (RPJM, RKP, dan PPAS). Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja Bappeda dan SKPK dan menghasilkan data perencanaan pembangunan yang otomatis, cepat dan akurat

Program mendukung keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja ini adalah sebagai berikut program perencanaan pembangunan daerah pada kegiatan Pengembangan Sistem Perencanaan Daerah Secara Elektronik.

C. Indikator kinerja “Jumlah Dokumen data dan informasi Pembangunan daerah yang tersedia” **dengan capaian 100%.**

Tercapainya target sesuai dengan yang ditetapkan karena dukungan sumber daya yang handal dalam mengelola website kabupaten, webGIS, serta dukungan dan sosialisasi berbagai aspek pembangunan yang dipublikasikan kepada masyarakat luas secara elektronik.

Adapun dokumen data/ informasi pembangunan daerah yang disuse/dipublikasi pada tahun 2018 meliputi:

1. Peta agrikebun, agrikultur dan agrisawah Kabupaten Pidie Jaya;
2. Dokumen Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Tahun 2019;
3. Buku Profil Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018;
4. Updating berita dan informasi pada website resmi Kabupaten Pidie Jaya;
5. Data Statistik Daerah;
6. Buku Perkembangan Pembangunan Daerah;
7. Dokumen akademik kajian pemetaan kawasan peternakan;
8. Dokumen potensi ekonomi daerah tahun 2018;
9. Laporan Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2018;
10. Grand design pembangunan kependudukan kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2020

Program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Data/Informasi

Kegiatan:

- a. Geografis Informasi Sistem (GIS)
 - b. Pusat Data/Informasi (Pusdatin) Bappeda Kabupaten Pidie Jaya
 - c. Penyusuna Profil Kabupaten Pidie Jaya
 - d. Pengembangan Database Pembangunan Daerah
 - e. Publikasi Data/Informasi Pembangunan Daerah melalui Teknologi Informasi
 - f. Publikasi Data Statistik Daerah
2. Program Kerjasama Pembangunan
Kegiatan: Penyusunan Perkembangan Pembangunan Daerah
 3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan:

- a. Peningkatan Kemampuan Teknis Penguasaan Teknologi dan Informasi Aparat Perencana
4. Program perencanaan pembangunan ekonomi

Kegiatan:

- a. Penyusunan Perencanaan Perkembangan Ekonomi Masyarakat
- b. Promosi Potensi Pembangunan Bidang ekonomi
5. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

Kegiatan:

- a. Penanggulangan Kemiskinan Daerah
- b. Percepatan Pembangunan Gampong

3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran per Kegiatan Tahun 2018

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI (RP)	%
1	Program Perencanaan Tata Ruang	51.000.000	50.861.700	99,73
	- Pengendalian Tata Ruang	51.000.000	50.861.700	99,73
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.481.040.000	1.434.157.773	96,83
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.500.000	6.485.000	99,77
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	235.700.000	217.932.538	92,46
	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	46.800.000	45.000.000	96,15
	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	103.000.000	103.000.000	100,00
	- Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	20.000.000	20.000.000	100,00
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	247.200.000	245.305.000	99,23
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	1.310.000	26,20
	- Penyediaan Makanan dan Minuman	226.600.000	220.880.500	97,48

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	312.940.000	303.244.735	96,90
	- Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	10.000.000	10.000.000	100,00
	- Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis	267.300.000	261.000.000	97,64
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.170.563.113	1.166.094.500	99,62
	- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	75.963.113	75.290.000	99,11
	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	21.000.000	20.775.000	98,93
	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	67.600.000	65.296.500	96,59
	- Rehabilitasi Sedang/berat gedung kantor	1.006.000.000	1.004.733.000	99,87
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	53.500.000	53.131.750	99,31
	- Pendidikan dan Pelatihan Formal	53.500.000	53.131.750	99,31
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	27.600.000	27.300.000	98,91
	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	27.600.000	27.300.000	98,91
6	Program Pengembangan Data Dan Informasi	481.635.000	476.025.112	98,84
	- Geografis Informasi Sistem (GIS)	165.985.000	164.943.112	99,37
	- Pusat Data/Informasi (Pusdatin) Bappeda Kabupaten Kidie Jaya	94.850.000	93.385.000	98,46
	- Penyusunan Profil Kabupaten Pidie Jaya	35.800.000	35.700.000	99,72
	- Pengembangan Database Pembangunan Daerah	93.100.000	92.657.000	99,52
	- Publikasi Data/Informasi Pembangunan Daerah Melalui Teknologi Informasi	28.800.000	28.800.000	100,00
	- Publikasi Data Statistik Daerah	63.100.000	60.540.000	95,94
7	Program Kerjasama Pembangunan	161.200.000	160.874.800	99,80
	- Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Khusus	75.500.000	75.265.000	99,69
	- Percepatan Pembangunan Daerah	51.900.000	51.829.800	99,86
	- Penyusunan Perkembangan Pembangunan Daerah	33.800.000	33.780.000	99,94
8	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	443.995.000	437.855.901	98,62
	- Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air	237.300.000	235.739.345	99,34
	- Pelaksanaan Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) dan Air Minum dan AMPL	159.940.000	155.361.556	97,14

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	- Peningkatan Kemampuan Teknis Penguasaan Teknologi Dan Informasi Aparat Perencana	46.755.000	46.755.000	100,00
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.533.351.500	1.511.780.361	98,59
	- Penyusunan Rancangan RKPD	61.791.500	57.795.000	93,53
	- Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	283.410.000	279.083.272	98,47
	- Monitoring; Evaluasi; Pengendalian; dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	156.550.000	154.991.150	99,00
	- Penyusunan RKT	23.700.000	23.568.000	99,44
	- Penyusunan KU-APBK	33.700.000	33.325.000	98,89
	- Penyusunan PPAS	35.400.000	34.955.000	98,74
	- Penyusunan PPAS Perubahan	27.450.000	26.890.000	97,96
	- Penyusunan KU-APBK Perubahan	24.850.000	24.290.000	97,75
	- Penyusunan Dokumen Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM)	139.400.000	139.233.000	99,88
	- Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu Jangka Menengah	25.800.000	25.668.070	99,49
	- Transparansi Dan Percepatan Realisasi Anggaran	102.400.000	102.380.069	99,98
	- Penyusunan Perubahan RKPD	24.000.000	20.800.000	86,67
	- Pengembangan Sistem Perencanaan Daerah Secara Elektronik	345.000.000	342.256.800	99,20
	- Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD	189.800.000	187.645.000	98,86
	- Penetapan Perubahan RPJMD	60.100.000	58.900.000	98,00
10	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	429.600.000	429.129.405	99,89
	- Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	205.000.000	204.996.405	100,00
	- Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	123.050.000	122.870.000	99,85
	- Promosi Potensi Pembangunan Ekonomi Daerah	101.550.000	101.263.000	99,72
11	Program Perencanaan Sosial Dan Budaya	520.800.000	490.490.239	94,18
	- Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya	145.010.000	141.764.093	97,76
	- Penanggulangan Kemiskinan Daerah	256.040.000	240.640.146	93,99
	- Fasilitasi Percepatan Pembangunan Gampong	88.950.000	78.530.000	88,29
	- Pelaksanaan Program SDGS	30.800.000	29.556.000	95,96

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
12	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	477.620.000	476.826.198	99,83
	- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya	107.950.000	107.712.500	99,78
	- Pelaksanaan Program Penanganan Lahan Kritis Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	151.210.000	151.098.045	99,93
	- Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD	218.460.000	218.015.653	99,80
	TOTAL	6.831.904.613	6.714.527.739	98,28

BAB IV**PENUTUP**

Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 merupakan pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2018 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Renstra Bappeda Kabupaten Pidie Jaya.

Tingkat pencapaian tujuan dan sasaran beserta target-target yang telah ditetapkan didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 telah semaksimal mungkin diinformasikan dalam laporan kinerja ini.

Laporan Kinerja BAPPEDA tahun 2018 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawaban sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Penyelenggaraan kegiatan di Bappeda Kabupaten Pidie Jaya pada Tahun Anggaran 2018 merupakan tahapan dari Perubahan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2014-2019. Secara umum, pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Pidie Jaya tahun 2018 berdasarkan hasil pengukuran yang disajikan dalam laporan kinerja ini dikategorikan sangat baik, dengan capaian kinerja rata-rata 100 %. Keberhasilan yang dicapai adalah berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak. Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga visi Bappeda dapat terwujud.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Pidie Jaya tahun 2018 ini disusun. Semoga penyusunan Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi serta mendorong dan menjadi motivasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.